UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kesejahteraan Komunitas PKL di Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta: Tinjauan Dampak Lokal Hukum Internasional
Shabirah Milanda Gusmadi, Rangga A. Dachlan, S.H., LL.M., M.Phil., D.Phil.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

KESEJAHTERAAN KOMUNITAS PKL DI KAWASAN WARISAN DUNIA SUMBU FILOSOFI YOGYAKARTA: TINJAUAN DAMPAK LOKAL HUKUM INTERNASIONAL

Oleh:

Shabirah Milanda Gusmadi[1]

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kerangka hukum internasional tentang warisan budaya bagi kesejahteraan komunitas lokal melalui studi kasus spesifik, yakni penurunan kesejahteraan komunitas PKL Malioboro yang direlokasi dalam rangka pengelolaan situs Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap sejumlah narasumber yang demografinya ditentukan melalui metode *snowball sampling.* Narasumber yang diwawancarai antara lain komunitas eks-PKL Malioboro; advokat dari LBH Yogyakarta; serta pejabat dari Dinas Kebudayaan DIY, BPKSF, Sekretariat DPRD DIY, dan Paniradya Kaistimewaan. Sementara itu, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa penurunan kesejahteraan PKL Malioboro disebabkan oleh regulasi Warisan Dunia yang dalam praktiknya melegitimasi pengabaian terhadap hak-hak komunitas lokal, termasuk pedagang informal, melalui beberapa hal, yaitu: 1) kemungkinan adanya berbagai interpretasi terhadap kriteria dan nilai warisan budaya yang disyaratkan oleh regulasi Warisan Dunia; 2) dominasi peran negara dalam mengelola Warisan Dunia, termasuk dalam menentukan nilai warisan budaya dan menentukan kebijakan pengelolaan.

Kata kunci: Warisan Budaya; Warisan Dunia; Sumbu Filosofi; Kesejahteraan.

[1] Mahasiswa Strata Satu (S-1) Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kesejahteraan Komunitas PKL di Kawasan Warisan Dunia Sumbu Filosofi Yogyakarta: Tinjauan Dampak Lokal Hukum Internasional
Shabirah Milanda Gusmadi, Rangga A. Dachlan, S.H., LL.M., M.Phil., D.Phil.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

WELFARE OF THE STREET VENDOR COMMUNITY IN THE WORLD HERITAGE AREA OF THE COSMOLOGICAL AXIS OF YOGYAKARTA: A LOCAL IMPACT REVIEW OF INTERNATIONAL LAW

By:

Shabirah Milanda Gusmadi[1]

ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of the implementation of an international legal framework on cultural heritage on the well-being of local communities, through a specific case study of the decline in the well-being of the Malioboro street vendor community following their relocation in the management of the Yogyakarta Philosophical Axis.

This research is an empirical study employing a qualitative descriptive approach. The data used consist of both primary and secondary sources. Primary data were obtained through interviews with selected informants, whose demographics were determined using a snowball sampling method. The informants included former members of the Malioboro street vendor community; advocates from the Yogyakarta Legal Aid Institute; and officials from the Yogyakarta Cultural Office, the BPKSF, the Secretariat of the Yogyakarta Regional People's Representative Council (DPRD), and the Paniradya Kaistimewaan. Meanwhile, secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, were collected through a literature review.

The findings and discussion of this research conclude that the decline in the well-being of Malioboro street vendors is linked to the implementation of World Heritage regulations, which, in practice, legitimize the marginalization of local communities, including informal vendors. This occurs through several factors: (1) the potential for multiple interpretations of cultural heritage criteria and values required under World Heritage regulations; and (2) the dominant role of the state in World Heritage management, including in defining cultural values and determining management policies.

Keywords: *Cultural Heritage; World Heritage; Philosophical Axis; Welfare.*

---

[1] *Undergraduate Student in International Law Department at Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.*